

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Karakteristik Informan

Nama :

Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk Anggota DPRD Perempuan

1. Bagaimana posisi perempuan di lembaga politik?
2. Bagaimana pandangan ibu terhadap pandangan politik perempuan?
3. Bagaimana implementasi ketentuan kuota 30% anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019-2024?
4. Bagaimana ibu mendefinisikan peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan?
5. Apakah terdapat faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan?
6. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Karakteristik Informan

Nama :

Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

1. Apakah ada persoalan-persoalan perempuan yang sering muncul di Kabupaten Pangandaran?
2. Apakah sudah ada aturan hukum yang dibuat oleh anggota dewan?
3. Apakah terdapat kontribusi anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Pangandaran?
4. Bagaimana dinas pemberdayaan perempuan menilai peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di Kabupaten Pangandaran?
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan untuk mendukung peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan?
6. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran anggota legislatif dalam merespon kepentingan perempuan?

PEDOMAN WAWANCARA

C. Karakteristik Informan

Nama :

Jabatan :

D. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk masyarakat atau korban kekerasan

1. Apakah ibu mendapatkan pelayanan dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Pelindungan Anak ataupun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak?
2. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan oleh DKBP3A ataupun P2TP2A kepada ibu?
3. Dalam melakukan pelayanan yang diberikan dari DKBP3A ataupun P2TP2A seperti pendampingan dan rehabilitasi ini, apakah ibu pernah didampingi oleh anggota dewan perempuan?
4. Upaya apa yang diberikan oleh anggota dewan perempuan kepada ibu?
5. Apakah anggota dewan perempuan berperan penting selama ibu diberikan pelayanan oleh DKBP3A ataupun P2TP2A?

MATRIKS WAWANCARA

Pertanyaan	Informan				Keterangan
	Dyah Retu Badraeni, S.Sn Anggota Komisi II (21 November 2023)	Sri Rahayu, S.Sos. Wakil Ketua Komisi IV (27 November 2023)	Ade Ruminah, S.H. Anggota Komisi II (19 Desember 2023)	Yeyen Windiani, S.H. Anggota Komisi IV (4 Januari 2024)	
Bagaimana posisi perempuan di lembaga politik?	Posisi perempuan di lembaga politik sangatlah penting. Karena DPRD merupakan perwakilan masyarakat yang	Untuk posisi perempuan dalam lembaga legislatif sendiri sebenarnya sama saja dengan laki-laki. Karena	Pertama dalam politik sendiri terkhusus dalam legislatif harus ada keterwakilan dari perempuan karena untuk menampung	Untuk posisi perempuan dalam lembaga legislatif sendiri sebenarnya sama saja dengan laki-laki. Karena memang dalam	Keempat informan mendefinisikan apabila posisi perempuan di lembaga politik sangatlah penting dan tidak memiliki

	<p>mana tentunya dalam hal ini keterwakilan dari setiap elemen masyarakat harus hadir di dalamnya termasuk kaum perempuan pun menjadi prioritas pemerintah dibuktikan dengan adanya kuota 30% bagi kaum perempuan untuk legislatif</p>	<p>memang dalam lembaga legislatif ini memiliki hak dan kewajiban maupun aturan yang berlaku tanpa melihat dari jenis kelamin dan tanpa membedakan satu sama lain sehingga tercapai kerja-kerja yang kolektif kolegial satu sama lain. Dengan adanya</p>	<p>segala aspirasi perempuan dan dapat terwakili oleh kita. Dengan adanya aturan kuota 30% untuk perempuan dalam legislatif ini diharapkan dapat mewakili kepentingan perempuan. Minimalnya ketika sudah terdapat keterwakilan dari perempuan kita dapat mengetahui</p>	<p>lembaga legislatif ini memiliki hak dan kewajiban maupun aturan yang berlaku tanpa melihat dari jenis kelamin dan tanpa membeda-bedakan satu sama lain sehingga tercapai kerja-kerja yang kolektif kolegial satu sama lain. Dengan adanya perempuan dalam lembaga politik menunjukkan bahwa</p>	<p>perbedaan dengan laki-laki, tidak ada perbedaan tugas atau wewenang yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang berjenis kelamin perempuan.</p>
--	--	--	---	--	---

		perempuan dalam lembaga politik menunjukan bahwa perempuan ini telah diberikan ruang agar dapat ikut terlibat secara aktif dalam dunia politik dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.	kendala-kendala dan kepentingan perempuan sehingga dapat tersampaikan secara langsung.	perempuan ini telah diberikan ruang agar dapat ikut terlibat secara aktif dalam dunia politik dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.	
Bagaimana pandangan ibu terhadap pandangan	Pandangan saya terhadap perempuan tentunya sangat	Pada saat ini perempuan telah diberikan ruang untuk bisa terlibat	Pada saat ini posisi perempuan dalam politik bukan lagi menjadi hal yang	Pada saat ini posisi perempuan dalam politik bukan lagi menjadi hal yang	Semua narasumber menyatakan apabila dengan masuknya

<p>politik perempuan?</p>	<p>bagus. Karena perempuan pun memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Apalagi dengan adanya konsep kesetaraan gender tentunya politik perempuan menjadi gerbang awal yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa terlibat dalam politik. Selain itu, politik perempuan</p>	<p>secara aktif dalam berbagai sektor kegiatan termasuk salah satunya politik. Dengan adanya ruang tersebut perempuan dapat menyampaikan segala aspirasi dan kepentingan yang nantinya diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Dengan adanya</p>	<p>asing. Karena sebagai manusia perempuan sudah seharusnya menerima segala haknya termasuk untuk bisa terlibat dalam politik. Tentunya dengan terbukanya kesempatan bagi perempuan dalam politik memberikan sebuah ruang bagi perempuan supaya bisa menyampaikan</p>	<p>asing. Karena sebagai manusia perempuan sudah seharusnya menerima segala haknya termasuk untuk bisa terlibat dalam politik. Tentunya dengan terbukanya kesempatan bagi perempuan dalam politik memberikan sebuah ruang bagi perempuan supaya bisa menyampaikan</p>	<p>perempuan ke dunia politik merupakan suatu bentuk dari kesetaraan gender, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpolitik.</p>
---------------------------	---	--	---	---	--

	pun dapat menjadi suatu jembatan bagi masyarakat terkhususnya kaum perempuan agar bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.	politik perempuan kedepannya diharapkan dapat merubah mindset tersebut dimasyarakat sehingga dapat menghadirkan kesetaraan dan kaum perempuan pun dapat menerima hak yang sama dengan laki-laki.	atau menyerap setiap aspirasi atas permasalahan dan kebutuhan perempuan, dan juga dapat memberikan sebuah ruang agar bisa menyampaikan setiap kepentingannya.	atau menyerap setiap aspirasi atas permasalahan dan kebutuhan perempuan, dan juga dapat memberikan sebuah ruang agar bisa menyampaikan setiap kepentingannya.	
Bagaimana implementasi	Untuk saat ini kami	Untuk pemenuhan kuota 30%	Untuk sekarang hampir dari setiap	Implementasi kuota 30% bagi kaum	DPRD Kabupaten Pangandaran

<p>ketentuan kuota 30% anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019-2024?</p>	<p>mengkondisikan keterwakilan perempuan dalam legislatif itu sebanyak 30%, kami mengupayakan agar setiap partai harus bisa menghadirkan keterwakilan dari perempuan dalam pencalonan legislatif agar harapan pemenuhan keterwakilan</p>	<p>sendiri di pangandaran hari ini telah hampir memenuhi hal tersebut dengan bergabungnya 10 orang anggota legislatif perempuan dari keharusan 12 orang. Hal ini menunjukkan untuk pangandaran sendiri sudah lebih baik dibandingkan</p>	<p>partai memiliki keterwakilan dari perempuan. Untuk di DPRD sendiri yang notabene nya kaum laki-laki, dari 40 orang anggota legislatif terdapat 10 orang anggota perempuan dan tergabung dalam setiap komisi. Jadi setiap permasalahan yang ada dari setiap komisi dapat terwakili oleh</p>	<p>perempuan di DPRD Pangandaran sendiri belum memenuhi. Memang secara aturan kita harus 30% akan tetapi untuk sekarang baru terdapat 10 org yang menjadi anggota DPRD yang seharusnya 12 org sehingga belum memenuhi kuota tersebut. Sebenarnya, perihal</p>	<p>belum memenuhi ketentuan kuota 30% yang telah ditentukan oleh regulasi. Meskipun demikian, jumlah Anggota perempuan DPRD Kabupaten Pangandaran telah mencapai 25%.</p>
--	--	--	---	---	---

	perempuan ini bisa terwujud. Untuk di pandangan tersendiri keikutsertaan perempuan dalam legislatif itu baru 10 dewan perempuan berarti sekitar 25%	dengan daerah-daerah lain yang masih belum bisa memenuhi hal tersebut.	anggota perempuan tersebut sehingga kepentingan perempuan dapat kami sampaikan.	kuota 30% ini merupakan angka minimal bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam politik terkhusus pencalonan. Jadi jika terdapat anggota perempuan yang melebihi 30% itu boleh saja karena itu hanya menjadi angka minimal	
Bagaimana ibu mendefinisikan	1. Dalam perencanaan	1. Dalam hal ini kami sedang	1. Untuk saat ini Kabupaten	1. Untuk saat ini produk hukum	Anggota perempuan selalu

<p>peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan?</p>	<p>peraturan daerah, tentu anggota DPRD perempuan dilibatkan dan bekerjasama dengan anggota DPRD laki-laki karena samasama diberi kewenangan dan fungsi legislasi tadi. Tapi dari beberapa peraturan daerah yang direncanakan, maka yang paling dominan berkaitan dengan keputusan</p>	<p>mengupayakan untuk membentuk suatu Perda yang mana di dalamnya memuat terkait peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik. Kami sudah melakukan beberapa kali pembahasan terkait Perda ini namun untuk saat ini belum bisa di sahkan</p>	<p>Pangandaran sendiri telah memiliki peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 yang di dalamnya memuat perihal pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi kami sebagai anggota legislatif untuk bisa memaksimalkan peran kami dalam</p>	<p>terkait perempuan di Kabupaten Pangandaran masih terbatas., hanya baru mampu membuat satu perda yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2019. Perda ini mengatur terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan</p>	<p>dilibatkan dalam penjalanan fungsi dari legislatif, yakni; legislasi, <i>budgeting</i>, dan anggaran.</p>
---	--	--	---	--	--

	<p>dan hasil pemikiran DPRD perempuan adalah peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.</p> <p>2. Dalam beberapa kali kesempatan kami telah melakukan penyerapan aspirasi di masyarakat baik itu dalam reses</p>	<p>karena masih dalam bentuk rancangan Perda. Dengan adanya perda ini kami harap dapat mempertegas bahwa perempuan memiliki hak dalam politik dan mampu berperan didalamnya.</p> <p>2. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, salah satu</p>	<p>merespon kepentingan perempuan. Selain itu kami juga sedang merancang peraturan daerah terkait peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi perempuan untuk bersaing di masyarakat.</p>	<p>pemerintahan, hukum, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Ini merupakan suatu terobosan bagi kami untuk memaksimalkan peranan kami dalam merespon kepentingan perempuan</p> <p>2. Untuk melakukan fungsi pengawasan kami</p>	
--	---	--	---	---	--

	<p>maupun sosialisasi tentang keberempuhan. Dari itu kami telah mendapati bahwa perempuan ini memerlukan kebijakan yang dapat menunjang atas diterimanya hak perempuan dalam politik. Sehingga dengan ini kami dalam bebeapa kesempatan rapat baik itu RDP</p>	<p>tindakan yang kami lakukan adalah dengan melaksanakan dengar pendapat bersama alat kelengkapan lain yang telah dibentuk bersama dengan organisasi kemasyarakatan atau pihak terkait lainnya. Dengar pendapat ini kami lakukan dalam upaya untuk check and balance</p>	<p>2. Dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan, kami melakukan pengawasan melalui kegiatan kunjungan kerja kepada pihak yang terkait dengan pemberdayaan perempuan baik itu organisasi maupun dinas-dinas seperti DKBP3A atau PPTP2A. Kunjungan kerja</p>	<p>melaksanakan kegiatan reses. Karena dalam kegiatan ini anggota DPRD Kab. Pangandaran baik secara kelompok maupun secara perorangan dapat bertemu langsung dengan konstituen, sehingga dalam kegiatan reses sangat efektif dalam menampung aspirasi masyarakat</p>	
--	--	--	---	--	--

	<p>ataupun rapat lainnya menyampaikan hal tersebut dan menghasilkan suatu rancangan Perda yang hari ini masih kami kaji agar bisa disahkan yaitu perda tentang peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.</p> <p>3. Dalam pelaksanaan fungsi</p>	<p>pelaksanaan kebijakan yang telah ada termasuk kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum? Sehingga kami dapat mengetahui jika masih ada kekurangan dan melakukan evaluasi dan</p>	<p>dilaksanakan untuk melihat lebih dekat atas suatu kegiatan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Peraturan Daerah maupun kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.</p> <p>3. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017</p>	<p>untuk dirumuskan dalam membuat rancangan peraturan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan reses anggota DPRD akan mendapatkan masukan secara langsung atas pelaksanaan Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya terutama tentang pemberdayaan perempuan. Hasil</p>	
--	--	---	---	--	--

	<p>pengawasan terkait keberempuanan, kami memiliki mitra yaitu dinas DKBP3A, yang mana kemitraan itu kami awasi dalam hal kegiatan yang ada di dinas tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan senantiasa kami awasi karena itu</p>	<p>proyeksi. 3. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, tentu hal yang pertama adalah melakukan penjangkaran aspirasi baik itu dengan reses atau lainnya kepada masyarakat terkhusus dalam hal ini perempuan yang nantinya akan ditindak lanjuti menjadi</p>	<p>tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Pangandaran, dalam melaksanakan fungsi anggaran kami tinggal melakukan pengecekan atau pengevaluasian terhadap RAPBD yang diajukan kepada kami, karena dalam</p>	<p>kegiatan reses selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan dan seterusnya dibawa pada sidang Paripurna, untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagai mana seharusnya 3. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran terdapat alat kelengkapan yaitu Badan Anggaran yang</p>	
--	---	--	--	---	--

	<p>merupakan salah satu fungsi DPRD Kab. Pangandaran</p> <p>4. Dalam hal ini kami selalu mengupayakan untuk mengusulkan program pemberdayaan perempuan untuk mengangkat taraf kesejahteraan perempuan dalam setiap penyusunan anggaran, sehingga</p>	<p>KUA dan PPAS sampai menjadi RAPBD. Sehingga komitmen kami dalam merespon kepentingan perempuan ini bisa dilaksanakan secara konkret baik dalam bentuk kebijakan maupun program kerja</p>	<p>Perbup tersebut sudah secara jelas Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran kebijakan baik itu perencanaan penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan</p>	<p>bertugas untuk mengurus tentang penyusunan APBD, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD. Untuk sekarang terdapat 7 orang anggota DPRD perempuan yang terlibat didalamnya. Hal ini tentu menjadi suatu hal positif untuk kami dalam merespon</p>	
--	--	---	---	--	--

	kegiatan atau program tersebut dapat dimasukkan kedalam rencana kerja atau RAPBD Kab. Pangandaran. Dengan dimasukkan usulan tersebut dalam RAPBD tentu diharapkan dapat menjadi langkah nyata dari kami dalam memenuhi kebutuhan perempuan		pembangunan, sehingga hal ini memudahkan kami dalam menjalankan tugas kami.	kepentingan perempuan karena terdapat keterwakilan perempuan didalamnya.	
Apakah	Saat ini yang	Hal yang menjadi	Faktor yang	Sebenarnya tidak	Tiga informan

terdapat faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan?	menjadi permasalahan adalah tingkat pengetahuan atau pemahaman kaum perempuan itu tersendiri. hal ini terjadi karena masih banyaknya kaum perempuan yang masih berpendidikan rendah. Sehingga hal ini mengakibatkan kaum perempuan sulit untuk	penghambat yaitu adat istiadat yang ada dimasyarakat yang menganggap bahwa kaum perempuan hanya memiliki kemampuan sebatas ibu rumah tangga saja. Sehingga kaum perempuan ini menganggap urusan diluar rumah tangga seperti kerja dan sebagainya itu	mempengaruhi responsibilitas kepentingan perempuan pertama kaum perempuan ini dikarenakan kaum perempuan memerlukan perwakilan untuk memperjuangkan setiap kepentingan dan permasalahan yang terjadi terhadap kaum perempuan. Sehingga kami sebagai anggota	ada hal yang secara signifikan menjadi faktor yang mempengaruhi kita dalam merespon kepentingan perempuan. Kita sebagai wakil rakyat tentunya harus bisa memenuhi setiap kebutuhan masyarakat tanpa membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki dipandangan kami	menyatakan apabila faktor yang mempengaruhi peran dari anggota legislatif perempuan adalah stereotif dari masyarakat yang menganggap perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, sementara, ibu Yeyen Windiani, S.H. berpendapat
--	--	--	---	---	---

	bersaing dimasyarakat.	urusan laki-laki.	legislatif perempuan yang diberikan kepercayaan masyarakat sudah seharusnya menjalankan tugas dan kewajiban kami secara baik agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dalam upaya pelibatan perempuan di dunia politik, terkadang	semuanya sama. Siapapun yang membutuhkan kami tentunya sebagai wakil rakyat kami memiliki tanggung jawab untuk bisa membantu masyarakat.	apabila tidak ada hal yang signifikan untuk mempengaruhi peran perempuan.
--	------------------------	-------------------	---	--	---

			<p>terbentur dengan anggapan masyarakat yang menganggap laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Karena legislatif ini bersifat keterwakilan, sehingga bagi kami sangat sulit untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk bisa mewakilinya dalam legislatif.</p>		
--	--	--	---	--	--

			Selanjutnya, Salah satunya kaum perempuan ini terkadang sulit untuk terbuka atau speak up terkait permasalahan yang terjadi kepada mereka. Sehingga hal ini terkadang menghambat terhadap upaya kami dalam penyerapan aspirasi untuk merespon kepentingan mereka terutama		
--	--	--	---	--	--

			dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.		
Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran anggota legislatif perempuan dalam	Upaya kami dalam merespon kepentingan perempuan seminimal-minimalnya dari setiap komisi harus terdapat anggota perempuan yang ikut terlibat secara	Untuk upaya kami dalam merespon kepentingan perempuan, selain penyerapan aspirasi, kami juga memiliki beberapa program kerja yang dapat	Dalam melakukan pemberdayaan perempuan, kami dapat memaksimalkan organisasi-organisasi yang sebelumnya sudah terbentuk seperti IWAPI, IKIAD,	Upaya yang kami lakukan yaitu memberikan ruang atau wadah untuk kaum perempuan agar lebih berani untuk tampil speak up di masyarakat tanpa melupakan qodratnya sebagai	Setiap narasumber memiliki pendapat yang berbeda, diantaranya: 1. Setiap komisi harus terdapat minimal satu anggota perempuan. 2. Penyerapan

<p>merespon kepentingan perempuan?</p>	<p>aktif. Hal ini agar bisa mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan perempuan. Karena hari ini keberadaan perempuan dalam setiap leading sektor masyarakat memiliki peranan penting. Sehingga hal ini tentunya tidak boleh luput dari pengawasan dan controlling kami, baik itu</p>	<p>menunjang peningkatan kualitas pemahaman perempuan seperti, Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) dan mengadakan program kuliah sambil magang. Dalam rencana kerja kami</p>	<p>KPPI, Kader Posyandu, dan PKK sebagai bentuk pemberdayaan. Tentu pembentukan organisasi-organisasi ini bukan hanya sebatas menjadi sebuah perkumpulan saja, akan tetapi organisasi ini dibentuk berdasarkan</p>	<p>perempuan. Sehingga nantinya perempuan di Kab. Pangandaran ini dapat menyampaikan setiap aspirasinya melalui ruang-ruang yang diberikan oleh kami, baik berupa dialog seperti reses maupun ruang-ruang pelatihan lainnya. Selain itu, dengan melakukan pemberdayaan bagi</p>	<p>aspirasi dan pengadaan program kerja yang menunjang kemampuan perempuan.</p> <p>3. Memaksimalkan organisasi perempuan seperti IWAPI, IKIAD, kader posyandu, dll.</p> <p>4. Memberikan wadah sebagai ajang perempuan untuk bisa berani</p>
--	---	--	--	---	--

	<p>berupa kesejahteraan, keamanan dan perlindungan bagi perempuan. Selanjutnya, dalam upaya merespon kepentingan perempuan ini, kami melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi keperempuanan seperti IWAPI, IKIAD, KPPI, Kader Posyandu</p>	<p>terdapat beberapa program yang secara jelas konsen terhadap isu-isu perempuan diantaranya yaitu seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran dan kesadaran gender dan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola</p>	<p>urgensi atas permasalahan yang terjadi ada perempuan dan masih banyaknya kepentingan perempuan yang perlu dipenuhi.</p>	<p>perempuan diharapkan dapat menjadi suatu jalan agar perempuan bisa lebih berkualitas dari sebelumnya. Dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual untuk menyikapi hal tersebut, sebenarnya sudah terdapat organisasi yang mengurus perilah perlindungan</p>	<p><i>speak up</i>, salah satunya dengan mengakan reses.</p>
--	---	---	--	--	--

	<p>dan PKK.. Hal ini dilakukan baik dengan cara penyerapan aspirasi melalui organisasi tersebut ataupun dengan melakukan program kerja bersama baik dalam bentuk sosialisasi maupun pelatihan</p>	<p>usaha sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan peningkatan kompetensi dalam bidang usaha.</p>		<p>perempuan yaitu PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Sehingga kami tinggal mengupayakan untuk bisa memaksimalkan fungsi dari organisasi tersebut. Selain itu, kami upayakan dengan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan</p>	
--	---	---	--	--	--

				tenaga kerja perempuan dan menyediakan fasilitas untuk perlindungan tindakan kekerasan terhadap perempuan.	
--	--	--	--	--	--

MATRIKS WAWANCARA

Pertanyaan	Informan			Keterangan
	N (32 tahun) (13 Juli 2024)	D (39 tahun) (13 Juli 2024)	L (29 tahun) (16 Juli 2024)	
Apakah ibu mendapatkan pelayanan dari DKBP3A ataupun P2TP2A?	Ya saya mendapatkan pelayanan dari P2TP2A.	Saya mendapatkan pelayanan dan perhatian dari P2TP2A.	Iya saya mendapatkan pelayanan, perlindungan dan perhatian dari dinas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.	Ketiga informan ini berpendapat bahwa mereka mendapatkan pelayanan dari DKBP3A dan P2TP2A.
Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan oleh	Bentuk pelayanannya seperti konseling,	Pelayanannya dalam bentuk pendampingan	Konsultasi, perhatian dan pendampingan secara rutin datang ke	Ketiga informan ini berpendapat bahwa mereka diberikan

DKBP3A ataupun P2TP2A kepada ibu?	visit ke rumah oleh petugas P2TP2A. selain itu, saya mendapat pendampingan oleh oleh petugas ke faskes juga.	yaitu datang ke rumah oleh petugas P2TP2A dan konsultasi serta mendampingi dalam proses perceraian saya	rumah atau rehabilitasi. Selain itu mendampingi proses visum ke RSUD Pandega, mendampingi dan memberi perhatian sampai proses cerai selama 10 bulan.	bentuk pelayanan seperti konseling, konsultasi dan pendampingan ke rumahnya masing-masing.
Dalam melakukan pelayanan yang diberikan dari DKBP3A ataupun P2TP2A seperti pendampingan dan	Saya belum pernah didampingi oleh anggota dewan perempuan ataupun laki-laki.	Saya belum pernah ditemui dan didampingi oleh anggota dewan perempuan, saya hanya mendapat	Iya saya didampingi dan diberikan perhatian yang sangat lebih bahkan bantuan untuk mempermudah proses perceraian oleh ibu dewan Sri Rahayu.	Dari ketiga informan ini hanya 1 orang yang ditemui dan didampingi oleh anggota dewan perempuan. Kedua informan yang lain

rehabilitas ini, apakah ibu pernah didampingi oleh anggota dewan perempuan?		pelayanan dari P2TP2A.		tidak ditemui dan didampingi oleh anggota dewan perempuan
Upaya apa yang diberikan oleh anggota dewan perempuan kepada ibu?	Karena saya belum pernah didampingi oleh anggota dewan perempuan jadi saya tidak diberikan upaya apapun oleh anggota dewan perempuan.	Untuk upaya yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan kepada saya itu belum ada karena saya belum pernah di dampingi oleh anggota dewan perempuan.	Upaya yang dilakukan oleh ibu dewan dengan mencari bantuan kepada dinas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, bantuan kepada dinas pendidikan, bantuan kepada BPSDM, bantuan kepada bupati.	Hanya 1 orang informan yang mendapatkan upaya yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan, kedua orang informan yang lain tidak mendapatkan upaya dari anggota dewan perempuan.

<p>Apakah anggota dewan perempuan berperan penting selama ibu diberikan pelayanan oleh DKBP3A ataupun P2TP2A?</p>	<p>Mungkin kalo saya pernah di dampingi oleh anggota dewan perempuan, mungkin akan sangat berperan penting bagi proses penyelesaian masalah saya.</p>	<p>Menurut saya peran anggota dewan perempuan ini tidak ada kalo dalam kasus saya karena saya sendiri belum pernah di dampingi dan ditemui oleh anggota dewan perempuan itu.</p>	<p>Peran ibu dewan sangat penting karena mempercepat proses visum, proses perceraian, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan.</p>	<p>Hanya 1 orang informan yang mendapatkan peran anggota dewan perempuan selama proses penyembuhan dan pendampingan, kedua orang informan yang lain hanya mendapatkan pelayanan dari P2TP2A.</p>
---	---	--	---	--

MATRIKS WAWANCARA

A. Identitas Umum

Nama : Drs. Nanang, M.Si

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda Bagian Subkoordinator Seksi
Pemberdayaan Manusia

Pelaksanaan Wawancara: 24 November 2023

B. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah terdapat persoalan-persoalan perempuan yang sering muncul di Kabupaten Pangandaran?	Hambatan yang kami rasakan dalam merespon kepentingan perempuan terutama dalam kasus pelecehan seksual atau KDRT adalah susahnya perempuan ini untuk speak up terkait permasalahan yang mereka rasakan. Tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi kepada perempuan ini terungkap beberapa tahun kemudian sehingga membuat tindak lanjut dari pemerintah pun tidak on time. Hal ini dikarenakan

		korban merasa takut untuk melaporkan dan merasa hal ini merupakan sebuah aib bagi mereka.
2.	Apakah sudah terdapat aturan hukum yang mewakili kepentingan perempuan yang dibuat oleh anggota dewan?	Sudah ada, yaitu peraturan daerah no 5 tahun 2019 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
3.	Apakah terdapat kontribusi anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Pangandaran?	Kontribusi anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan sendiri tentu sangat besar. Karena selain menjadi tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat, mungkin ada nilai ataupun perasaan yang sama atas realitas sosial perempuan dimasyarakat. Sehingga hal ini menjadi suatu tuntutan bagi anggota legislatif perempuan sendiri untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan dan membantu memenuhi setiap kebutuhan kaum perempuan di Pangandaran.

4.	<p>Bagaimana dinas pemberdayaan perempuan menilai peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di Kabupaten Pangandaran?</p>	<p>Peran anggota legislatif perempuan sudah cukup baik. Apalagi dengan adanya organisasi-organisasi yang menaungi perempuan seperti KPPI, IWAPI dan IKIAD. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi terhadap permasalahan maupun kepentingan perempuan sendiri tidak luput dari pembahasan kami. Dengan adanya organisasi ini nantinya diharapkan bisa menjadi stimulus bagi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan. Selain itu, dengan adanya kegiatan-kegiatan baik itu sosialisasi, pembinaan dan pelatihan untuk perempuan di pangandaran sendiri diharapkan dapat menjadikan kaum perempuan di pangandaran ini lebih berkualitas sehingga dapat bersaing di masyarakat. Dan kami selalu mendukung apa yang</p>
----	---	---

		diupayakan oleh anggota legislatif terkhusus dalam pemberdayaan perempuan dan keterlibatan perempuan dalam politik.
5.	Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mendukung dan meningkatkan peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan?	Upaya yang senantiasa kami lakukan yaitu, kami mengupayakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan, edukasi, bimtek terkait hal-hal yang kami rasa dibutuhkan oleh kaum perempuan seperti pemahaman terkait kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, maupun pembinaan/pelatihan lainnya. Kami juga selalu bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan di Pangandaran.

HASIL RESES NARASUMBER

Nama	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ade Ruminah	Proses Pembagian Kartu BPJS dari Pemerintah Harus tepat Sasaran	Bantuan Renovasi Masjid Al-Muhajirin rt/rw 06/02	Rekontruksi jalan Kalijato-Ciparakan 5km Desa Kalijati	Perlu adanya pembangunan/perbaikan jalan desa Jalur Lingga sekitar 3 km - 4 km	Pembangunan rumah tidak layak huni di Dusun Patrol , Sinargalih, Cibenda, Budiasih, dan Sucen sebanyak 10 (sepuluh) unit
	Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk Penderes Nira di Desa Ciparakan	Turn DKM Cinta Falah rt/rw 01/02	Jalan objek wisarata Curug Taringgul ingin dicor Desa Kalijati	Perlu adanya penerangan (Lampu Mercury) di 2 (dua) titik terutama di depan Polsek Sidamulih dan di depan Mesjid Panyaweuyan Al-Hikmah Desa Pajaten	Jalan jalur Lingga, panjang 2.600 Meter, lebar 2,5 Meter
	Sinkronisasi			Perlu adanya	Pada saat ini

	data penerima BPJS Pemerintah yang sudah meninggal agar desa sigap mendata kembali	Bantuan Balandongan 2 lokal rt 04 dan rt 05	Ingin ada pengawasan terkait harga pupuk	pembangunan jembatan jalur pertanian jalan Panyaweuyan Jambesewu sekitar ± Panjang 16 m, Lebar 2 m	penduduk sedang mengajukan kartu tani, untuk itu mohon dorongan agar kartu tani segera terealisasi
		Bantuan pembelian gambelan untuk sanggar seni budaya dusun cipari	Sarana perairan Dusun Sukadana	Rutilahu RT 01 RW 08 Dusun Karanghonje atas nama Ibu Jusih	Jalan Sodong, Cintareksik, Mulyasari, Sawah Legang, dan Munggang Watu panjang 1.000 Meter, lebar 2,5 Meter (Kecamatan Sidamulih)
	Percepatan Pekerjaan Jalan Pagergunung-Kalijati kurang lebih 500 m agar segera dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebagai jalan alternatif masyarakat di Desa Ciparakan untuk menuju ke Pangandaran	Kenaikan Insentif RT dan RW	Pembangunan posyandi Dusun Sukadana dan Kalijati		
				Perlu adanya cermin di tikungan atau Safety Mirror Perlu adanya perbaikan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Benteng Masjid Baetul Mu'minin RT 001 RW 001, 30 Meter

	<p>Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Ciparakan harus di realisasikan mengingat sekitar 25 titik yang harus di pasang terutama di Jalur Sintong dan Jalur Tunggilis sebagai jalan menuju Pangandaran</p>	<p>Bantuan Pendidikan pertanian gratis untuk para petani di desa Parakanmanggu</p>	<p>Bantuan dana untuk peralatan Dusun Karang Pete</p>		
	<p>Jalur Salak menuju Panyutran dan Kalijati dari jalur Haji Sarlo sampai Jalur Kalijati pihak Desa ingin mengajukan menjadi Jalan Pemerintah Daerah</p>	<p>Bantuan Dana Bedah Rumah untuk masyarakat kurang mampu</p>	<p>Bantuan dana untuk peralatan pustu Dusun Kalijati</p>	<p>Perlu adanya pembangunan parit untuk mengantisipasi banjir di pemukiman Warga</p>	<p>Sanyo dan selang sebanyak 2 (dua) rol, RT 031 RW 002, Dusun Karanganyar</p> <p>Kilometer sebanyak 1 (satu) buah, Masjid Al Barokah, RT 018 RW 008</p>

	Hotmik jalan Alasmalang-Bojonggenteng penghubung Desa Wonoharjo-Pananjung				
	Hotmix Jalan Siliwangi penghubung Desa Wonoharjo-Cikembulan dan Pananjung	Bantuan Pembangunan MCK di Dusun Patrol	Pembangunan jembatan Panutuan Desa Kersaratu	Perlu adanya perbaikan Jalan Lapang-Bojong	
	Penerangan jalan desa dan perkampungan	Bantuan Dana Kesejahteraan masyarakat	PJU dan pengairan	Perlu adanya pembangunan rapat beton akses jalan masyarakat	Hotmix Jalan Cibeureum - Sukaresik, Dusun Cibeureum RT 003 RW 011 dengan volume 450 x 3 x 0,19 Meter
		Cor lapang Voli Dusun Pasir limus	Bukit Panenjoan Desa Kertaratu		
	Pembangunan Jalan Tagkisan (Dusun Sindangmangu) Desa Bagolo-Poros Pasir	Pembangunan Infrastruktur Jalan Dari Pasir limus ke SD 02 Ciliang	Hotmix Cilempung-Panenjoan 500m lanjutan Desa Kertaratu		

	Peundeuy sepanjang 1,5 KM				
	Pembangunan Jalan Poros Tangkisan Desa Bagolo sampai dengan perbatasan Desa Pamotan Palatar Agung sepanjang 1 KM	Bantuan Dana Kesejahteraan masyarakat	Jalan TPU ingin dicor 200m Dusun Cibodas		
	Ada 15 kepala keluarga disepanjang poros jalan Tangkisan-Palatar Agung belum teraliri listrik atau belum punya KWH Meter dan sepanjang jalan itu belum terdapat tiang jalan PLN (ingin masuk listrik	Masyarakat banyak yang belum mempunyai BPJS	PJU Desa Muara 3 RT 6/RW 2		

	PLN				
	Honorarium kader PKK yang belum turun	PJU sepanjangjalan desa	Muhola 6x12m Dusun Muara 3 RT 6/RW 2	Perlu adanya pembangunan saluran irigasi yang dari lapang sepak bola Cibenda ke Citiis	Pembangunan Balai Dusun Pasirmuncang, Dusun Pasirmuncang RT 001 RW 012, dengan volume 6 x 8 x 2 Meter
		Penerangan lampu jalan dan lampu sekitar lokasi Pantai Karapyak	Bantuan Renovasi Masjid Desa	Pembangunan pustu Desa Cikalong	Di Kabupaten Pangandaran adanya masalah tabungan siswa yang macet di koperasi, masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut
			Bantuan Pembuatan Cabluk 2 titik RT/02 RW 03	Sarana prasarana komunikasi, jaringan internet Desa Cikalong	Perlu adanya Pengembangan Desa Wisata terutama sarana prasarananya dan akses

				jalan yang masih kurang terutama jalan turunan \pm 150 m - 200 m lagi	
			Penghijauan ½ hektar lahan Desa Cikembulan	Perlu adanya pembangunan/perencanaan Posyandu Kenanga	
			Bantuan pembangunan lokasi untuk perdagangan dusun desa	Perlu adanya pembangunan Jalan Penghubung Jalur Desa Kalijati Menuju Arah Ciamis	
			{embangunan muim sejah Jawa Barat untuk daya tarik wisata	Perlu adanya penanggulangan Pemerintah akibat kenaikan BBM	

			Bantuan pembangunan lokasi untuk perdagangan	Untuk menambah daya tarik Wisata Batu Lumpang, perlu adanya pembenahan dan penataan yang lebih baik	
			Penataan taman Ciembulan Pass	Untuk menambah daya tarik Wisata Batu Lumpang, perlu adanya pembenahan dan penataan yang lebih baik	
			Pembangunan bank sampah dan PJU Desa Cikembulan	Perlu adanya pembangunan Jalan Rabat Beton (Jalan Parakan Cisalak)	
			Ingin ada pengawasan khusus untuk kelangkaan pupuk Desa Parakanmanggu	Perlu adanya pembangunan Jalan Rabat Beton (Coran) Jalan Tembusan Goa Kampret Bulakan	
			Warga menginginkan adanya sistem untuk PKM agar tetap sasaran		

			Membangun MCK untuk warga yang belum mempunyai MCK layak pakai		
			Drainase Dusun Sirnagalih		
Sri Rahayu, S.Sos.	Pembangunan Masjid An-Nur di SD IT Ibnu Ahkam, Bagolo	Penerangan Jalan Umum di RW 11	BPJS Kesehatan Gratis	Pemanfaatan tanah PJKA	Kesejahteraan atau honor Kader PKK.
	Ingin ada pembangunan destinasi wisata terpadu atau wisata andalan religi di tanah desa seluas 25 HA'	Jalan lapang giri mukti	Gaji Perangkat Desa yang belum dicairkan selama beberapa bulan terakhir	Permohonan bantuan Rutilahu	Dukungan kegiatan Karang Taruna Desa
	Perlu adanya bantuan pengembangan Desa Wisata dengan titik pengembangan di Dusun	Jalan nunggangwaru	Honorarium kader Posyandu, guru ngaji dan BPD agar dapat diterima di awal tahun	Penyerapan Tenaga Kerja	

	Cirantis				
	Bantuan untuk masyarakat Desa Sidomulyo banyak yang berdagang di Objek Wisata Pangandaran tetapi belum mempunyai Kartu Pedagang	Pembuatan Gor serbaguna	Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana pemerintahan di wilayah Kabupaten Pangandaran sudah dirasakan langsung oleh Masyarakat	Intensif RT/RW dan kader Posyandu	Kesejahteraan atau honor Kader PKK dan Posyandu
		Kartu tani lebih banyak disosialisasikan kembali	Terlambatnya proses pembangunan infrastruktur	Permohonan hibah untuk Masjid	
		Pemanfaatan Destinasi Wisata yang ada di Desa Putrapinggan	Penanganan Covid-19 di Desa Jangraga (Pemberian Maskar, Alat Tes Suhu Tubuh)	Pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU)	
	Pendataan dan pemberian bantuan yang masih belum tepat sasaran	Pembangunan	Melengkapi	Perbaiki jalan	

Bantuan untuk Pembekalan/Pelatihan Usaha Mikro bagi Masyarakat Desa Sidomulyo yang berprofesi sebagai Pedagang	Jembatan Bojong	ALKES di Puskesmas Kecamatan Mangunjaya untuk Penanganan Covid-19	Karanggondang – Bojong	
Bantuan BPJS untuk masyarakat kurang mampu	Pembangunan Pustu/Poskesdes	Sosialisasi tentang bahaya covid-19 kepada masyarakat	TPT Ciawitali	
Bantuan peningkatan kualitas dan kuantitas Peternakan di Desa Sidomulyo	Jalan Cirateun	Pelaksanaan Ambulans gratis masih banyak terjadi keluhan dari masyarakat	Pembangunan Jembatan Bojong	
Pengadaan/Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sebanyak 15 Unit	Badan Hukum dan Pembangunan Diniyah	Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit sering menjadi keluhan dari masyarakat yang berobat, Masyarakat mengharapkan	Pengadaan Ambulance Desa	

			<p>elayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas ditingkatkan serta penambahan Dokter Spesialis dan kelengkapan Alat Kesehatan lainnya</p>		
	<p>Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya sebanyak 75 Unit</p>	<p>Penarangan Jalan Umum menuju Dusun Cirateun</p>	<p>Masih lemahnya sumber daya manusia Kabupaten Pangandaran dan kurangnya personil di lingkup pemerintah Kabupaten Pangandaran</p>	<p>Rehab Postu Putrapinggan</p>	
	<p>Perbaikan/Normalisasi Saluran Air (selokan) di Wilayah Dusun Cirantis Desa Sidomulyo</p>				
	<p>Perbaikan Jalan di Wilayah Dusun Cirantis</p>	<p>Jembatan Luwuk Dusun Munggang Gondang</p>	<p>Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan dan</p>	<p>Jalan Inspeksi Balong Sidad</p>	

			perekonomian masyarakat		
	Pembangunan/Penambahan Saluran Air (Selokan) di Desa Sidomulyo khususnya Di Dusun Cirantis	TPT Bojong langsep Dusun Karanganyar	Pemasangan PJU	Rehabilitasi Poskesdes Dusun Sidomulyo Desa Sidomulyo volume 7m x 7m	
	Perbaikan Drainase di RT. 02 RW. 07 Bojong Genteng Sebelah Barat sekitar 100 Meter	Sumur Bor Sumur Bandung Dusun Sukajadi	Pembangunan sarana ibadah yang kondisinya sudah rusak	Pembangunan Posyandu Giri Kencana Dusun Pasirkored Desa Sidomulyo volume 7m x 8m	
	Badan Jalan Bojong Genteng harus di naikan karena terlalu rendah	Pembangunan Posyandu Galatik Dusun Munggang Gondang	Alat pertanian/traktor untuk setiap Dusun	Jalan Lapang Giri Mukti	
	Petani Bojong Genteng dan Kedung Rejo tidak ada Kelompok Tani sehingga kalau	Poskesdes	Pembibitan padi untuk kelompok tani	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan Tumpuk Dusun Pondoklombok sepanjang 423m	

	musim penanaman padi tidak ada informasi				
	Perbaikan Drainase Depan Sekolah SDN 4 Wonoharjo	Pembangunan Aula Desa Purbahayu	Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur untuk penanggulangan bencana banjir dan sarana air bersih	Peningkatan Jalan Pondoklombok – Wonoharjo Dusun Pondoklombok volume 650m x 2m	
	Pembinaan PKK	Pemerataan bantuan terutama bantuan UMKM yang belum maksimal		Peningkatan Jalan Sudimampir Dusun Pondoklombok volume 500m x 2m	
	Perbaikan Drainase RT. 03 RW. 01	Kartu tani supaya lebih disosialisasikan kembali karena banyaknya kelangkaan pupuk		Pembangunan Jalan dan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Yatin – Kedawung Dusun Sidomulyo sepanjang 360m	
	Peningkatan kualitas pendidikan khususnya Kecamatan	Penerangan Jalan Umum Bojongkarekes yang menuju ke Puskesmas		Pembangunan Rabat Pengerasan Dan Rabat Beton Jalan Satip - Tusih Dusun Pasirkored volume	

	Pangandaran yang dekat tempat wisata	Pangandaran		793m x 2m	
	Penanggulangan kasus pembullying di lingkungan sekolah	Drainase		Pembangunan Jalan Prumpung-Kedawung Dusun Sidomulyo volume 1155 m x 2 m	
	Penjelasan KIB aspirasi kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan namun terkendala biaya	Pemerataan bantuan terutama bantuan UMKM yang belum maksimal		Pembangunan Irigasi Skunder Pintu I (Paino-Pceren) Dusun Bantarkalong - Dusun Sidomulyo sepanjang 1000 m	
		Kartu tani supaya lebih disosialisasikan kembali karena banyaknya kelangkaan pupuk		Pembangunan Irigasi Skunder Pintu II (Desa-Gluguduwur) Dusun Sidomulyo sepanjang 1000 m	
		Jemabatan Kaliprayang – Sadiproyo		Pembangunan Jalan Wisata Goa Kaca Dusun	

				Pasirkored volume 647 m x 2 m.	
		Jalan Prambun Padasuka Cikembulan		Jalan Benjang Dusun Kalapatiga 1 KM desa babakan	
		Penerangan Jalan Umum		Jalan Lingkungan Dusun Karanggedang RW 04 Desa Babakan	
				Kesejahteraan/Insentif Kader PKK untuk segera di realisasikan	
				Pengadaan Sertifikat Tanah Gratis	
Dyah Retu Badraeni, S.Sn.	Pelayanan kesehatan agar lebih ditingkatkan lagi dari segi pelayanan, karena banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan pelayanan di RS. Pandega sehingga memilih berobat	Usulan Pemasaran UMKM Desa Babakan	Sosialisasi berkenaan Bantuan UMKM	Terkait penjualan usaha kecil di Desa Purbahayu yang masih sulit dan meminta bantuan bimbingan untuk di bentuk kelompok usaha kecil yang ada di Desa Purbahayu	Masalah BLT yang tidak tepat sasaran

	ke rumah sakit di daerah lain				
	Terkait BPJS diharapkan pemerintah dapat mengakomodasi masyarakat Kabupaten Pangandaran, karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS	Pembentukan sentra UMKM Desa Babakan	permasalahan proses promosi dan pemasaran produk UMKM	Bantuan budidaya perikanan	Program kuliah gratis
	Di Desa Pananjung merupakan wilayah rawan banjir, diharapkan Pemerintah bisa segera menangani air rob yang sering melanda daerah Pananjung	Tindak Lanjut BPJS bagi RT terpilih di Desa Babakan	sulitnya kordinasi dengan pihak bank terkait bantuan umkm	Bantuan UMKM yang masih tidak jelas prosesnya	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

	bahkan sering sampai masuk ke rumah warga				
	Dari seluruh proyek pembangunan jalan yang sudah selesai harap agar ada pemeliharaan jalan dari dinas yang berwenang supaya jalan yang sudah dibangun bisa lebih awet dan tahan lama	Solusi relokasi untuk kemajuan perekonomian di sekitaran pembangunan jembatan Babakan-Pangandaran	pemberian bantuan BPJS kertawaluya yang belum merata.	Terkait kurangnya pemasaran produk UMKM	Pembangunan dan perbaikan saluran air dan pintu dengan tujuan untuk penanggulangan air asin, 7 (tujuh) titik pintu air
		Solusi Pemasaran bagi pemilik usaha kecil di daerah Putrapinggan	Solusi agar UMKM yang ada di Desa Pananjung bisa berjalan secara berlanjut dan tidak berhenti sebatas ketika dapat bantuan saja	Pembangunan Gelanggang Olahraga di Desa Purbahayu	Bantuan modal untuk UMKM/Ekonomi Kreatif
	Madrasah Mutakin yang beralamat di RT. 17 RW 07 pembangunannya membutuhkan perhatian Pemda	Terkait Bantuan yang tidak tepat sasaran agar dapat lebih di perhatikan	Terkait penjualan usaha kecil di Desa Purbahayu yang masih sulit dan meminta bantuan bimbingan untuk di bentuk kelompok usaha kecil yang	Perbaikan Lapang Desa Purbahayu	Fasilitasi wifi gratis di lingkungan warga untuk membantu media belajar online

	Jalan Pasir Angin ke Palatar Agung ingin dijadikan Jalan Kabupaten		ada di Desa Purbahayu		
	Operasional mobil ambulance untuk Desa Bagolo belum terealisasi	Pembangunan selokan di jalan Dusun di Desa Putrappinggan	Terkait kurangnya pemasaran produk UMKM di Desa Purbahayu Dusun Sukajadi agar adanya pembentukan suatu tempat untuk memasarkan produk pengusaha kecil khususnya usaha rumahan agar dapat menjual produk mereka secara berlanjut.	Renovasi Balai Dusun Bengkekan	Jembatan akses warga menuju Perkebunan Blok Makam Karangsalam
	Intensif Kader Posyandu Dahlia	Area Wisata di Putrappinggan agar lebih di perhatikan	Pemeliharaan infrastruktur jalan agar menjadi perhatian pemerintah daerah	Pembangunan Jalan RT. 01 RW. 01 sepanjang 270 M Lebar 2 M Ketebalan 12 cm Dusun Bengkekan	Jalan Puskesmas - Pasar Lama Desa Kalipucang (lanjutan)
	BPJS gratis ingin di buatkan	Kendala dalam administrasi	Pemerintah Daerah meningkatkan	Penerangan Jalan Umum (PJU) di 6 titik	Pembangunan Tembok Penahan

	segera	bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah pusat tidak tepat sasaran	perhatian terhadap rumah tidak layak huni	Desa Sukahurip	Tanah (TPT) sungai/Anak Sungai Kalipucang Desa Kalipucang
	Batas Desa Bagolo-Pamotan-Emplak ingin di sahkan sesuai peta yang diharapkan	Pembangunan destinasi wisata yang ada di Desa Sukahurip	Penanganan Covid-19 di Desa Jangraga (Pemberian Maskar, Alat Tes Suhu Tubuh	Pembangunan bronjong sepanjang 40 M Tinggi 5 M Lebar 1 M Blok Gam Dusun Bengkekan Desa sukahurip	Pembangunan jembatan penghubung RW 002 RW 003 Dusun Girisetra Desa Kalipucang
	Kesejahteraan LPM ingin diperhatikan	Pelaksanaan Bombingan bagi pelaku UMKM di Desa Sukahurip	Melengkapi ALKES di Puskesmas Kecamatan Mangunjaya untuk Penanganan Covid-19	Terkait bantuan UMKM yang tidak tepat sasaran agar segera di tangani supaya tidak terjadi lagi hal tersebut	Pembangunan Rumah Tidak Layak huni
	Mengatasi Banjir di daerah Pangandaran Barat	Terkait Penerangan jalan yang masih minim	Sosialisasi tentang bahaya covid-19 kepada masyarakat	Membutuhkan lapak untuk usaha	Pembangunan Tugu Batas Jabar- Jateng
	Serapan Air harus diatasi karena padatnya	Terkait Kartu Tani yang belum di realisasikan agar	Pelaksanaan Ambulans gratis masih banyak	Solusi agar UMKM yang ada di Desa Pananjung bisa berjalan	

	bangunan yang ada di Desa Pangandaran	pada 2021 dapat di realisasikan	terjadi keluhan dari masyarakat	secara berlanjut dan tidak berhenti sebatas ketika dapat bantuan saja	
		Peningkatan perekonomian warga melalui UMKM	Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit sering menjadi keluhan dari masyarakat yang berobat, Masyarakat mengharapkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas ditingkatkan serta penambahan Dokter Spesialis dan kelengkapan Alat Kesehatan lainnya	Berkenaan dengan sulitnya koordinasi dengan pihak bank terkait bantuan UMKM, diharapkan ada solusi dari DPRD dan dinas terkait mengenai hal ini	
	Program PTSL harus direalisasikan mengingat masih ada warga	Solusi Pemasaran bagi UMKM yang ada di desa Sidomulyo	Masih lemahnya sumber daya manusia Kabupaten Pangandaran dan kurangnya personil	Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Babakan	

	yang belum mendapatkan Sertifikat Tanah		di lingkup pemerintah Kabupaten Pangandaran		
		Pembuatan BPJS bagi petani gula merah yang hampir 80% warga Desa Sidomulyo adalah Petani Gula Merah	Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat	Bantuan bibit pertanian	
	Pemerintah Desa agar menginventarisir Aset Desa dan segera diarsipkan	Pupuk Gratis bagi para petani	Pemasangan PJU	Pembangunan benteng di Lapang Desa Babakan	
	Program Digitalisasi Desa harus ditingkatkan, mengingat sekarang jamannya Digital	Konsep yang akan di terapkan bagi UMKM Daerah agar memiliki peran di Desanya sendiri	Alat pertanian/traktor untuk setiap Dusun	Bantuan UMKM yang masih tidak jelas prosesnya	
Pengembangan	Usulan	Pembibitan padi	Bantuan sampan kecil		

	UMKM Desa Pangandaran harus ditingkatkan dengan strategi yang baik sesuai dengan lokasi Desa Pangandaran yang berada di tempat wisata	diadakannya Pelatihan bagi pelaku UMKM di Desa Wonoharjo secara berkala	untuk kelompok tani		
	Peningkatan potensi pariwisata terkait pekerja dan harus ada Pelatihan Ketenagakerjaan	Terkait pembentukan wisata Pendopo yang di bangun oleh Pemprov agar masyarakat memiliki hak 60% demi perekonomian masyarakat Desa Wonoharjo lebih baik	Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur untuk penanggulangan bencana banjir dan sarana air bersih	Pembangunan MCK Mesjid Jami AL-Huda Dusun Bojong	
	Nasib Perangkat Desa mengenai	Permintaan unit Ambulance di Desa	Pembangunan sarana ibadah yang	Renovasi Mushola /Mesjid Hidayatussalam	

	TPAPD Tahun 2021 yang 11 bulan belum terbayarkan	Pananjun	kondisinya sudah rusak	Bojong	
		Terkait Lapangan Volly yang layak bagi pemuda Karang Sari		Cor Rabat Beton Jalan Bendungan Desa Putrapinggan	
		Relokasi selokan yang ada di depan Desa serta beberapa ruas jalan yang ada di Desa Pananjung		Cor Rabat Beton Jalan Mushola Hidayatussalam Bojong	
	Harus ada mobil pelayanan masyarakat untuk pertolongan pertama di Desa Pangandaran	Pembangunan Jalan hotmik yang masih belum rampung			
		Relokasi gelandangan yang ada di Desa Pananjung sebagai daerah Wisata			
		Penerangan jalan yang masih minim di beberapa ruas Desa Pananjung			
		Penambahan			

		tempat visio terapi anak di RS Pandega			
Yenyen Windiani, S.H.	Peningkatan Sumur BOR untuk Pengairan Sawah Dusun Sodong	Mercury RT 01/RW 07 1 (satu) titik	Masyarakat mohon kebijakan dari Pemerintah terkait penerimaan CPNS agar memprioritaskan Putra Daerah Kabupaten Pangandaran	Peningkatan jalan lingkungan RT. 02/10 Nusagede Desa Cijulang panjang 750 meter	Pengecoran jalan gang Dusun Kalensari Desa Kondangjajar
	Pembangunan jembatan RT 010/011	Mercury RT 01/RW 08 2 (dua) titik	Honorarium kader Posyandu, guru ngaji dan BPD agar dapat diterima di awal tahun	Peningkatan jalan desa/jalan Cipariuk-Tegalame RW. 10 Dsn. Nusagede Desa Cijulang panjang 1500 meter lebar 3 m tebal 0.20 m	Pembuangan air limbah
	Pembangunan Jembatan Leuwilopang	Mercury RT 03/RW 07 2 (satu) titik	Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana pemerintahan di wilayah Kabupaten Pangandaran sudah dirasakan langsung oleh Masyarakat	Pembinaan Kader PKK dalam penanggulangan bencana banjir (belanja alat2 dapur umum)	Pengecoran jalan gang Hadwia RT 027 Dusun Kalensari berbatasan dengan RT 020 Blok Babakan Dusun Binangun

	Pemberdayaan kader PKK		Terlambatnya proses pembangunan infrastruktur banyak dikeluhkan oleh masyarakat, dan diharapkan pembangunan infrastruktur jalan dapat menembus pelosok pedesaan, guna peningkatan taraf kehidupan dan pertumbuhan perekonomian yang akan berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun keagamaan		
	Pembangunan TPT Jalan Sodong	Pembangunan benteng posyandu ukuran 20x3 meter		Peningkatan jalan lingkungan/rabat beton RT. 05 RW. 14 Dsn. Nusagede Desa Cijulang panjang 1000 m lebar 2.5 m tebal 0.15 m	Peningkatan jalan lingkungan RT 002 RW 010 Nusagede Desa Cijulang panjang 750 Meter
	Pengadaan PJU Jalan Sodong	Pengerasan jalan lanjutan lingkaran Dusun 1 km	Pemeliharaan infrastruktur jalan agar menjadi	Peningkatan jalan Dusun Cikaler sepanjang 670 m	Peningkatan jalan desa/jalan Cipariuk - Tegalame RW 010

			perhatian pemerintah daerah		Dusun Nusagede Desa Cijulang panjang 1500 Meter, lebar 3 Meter, tebal 0.20 Meter
Perlu adanya pengadaan bibit dan kandang domba Kelompok Tani Mutiara Mekar	Hotmix jalan wisata Guha bau 2.550 meter		Pemerintah Daerah meningkatkan perhatian terhadap rumah tidak layak huni	Renovasi Moshola Desa	Pembinaan kader PKK dalam penanggulangan bencana banjir (belanja alat- alat dapur umum)
	TPT jalan pesantren RT 02 RW 08 Volume 200x3 meter		Peningkatan fasilitas penunjang wisata dan Pengembangan bibit Manggis dan Durian yang menjadi ciri khas atau primadona	Renovasi Balai Dusun Binangun	Peningkatan jalan lingkungan/rabat beton RT 005 RW 014 Dusun Nusagede Desa Cijulang panjang 1000 Meter, lebar 2.5 Meter, tebal 0.15 Meter
	Pengadaan bibit palawija dan pupuk Kelompok Tani Milenial				
	Pengadaan bibit ikan dan pakan ikan Kelompok Tani Balaka Dusun Sodong	Peningkatan Jalan gang RT 15/ RW 04 Dusun Binangun		Mohon adanya penambahan jam PAI (pelajaran Pendidikan Agama Islam) jangan hanya 1 jam pelajaran, karena	TPT Jalan Kalangsari mulai dari depan Warung Asem sampai Pesantren

	Pengadaan alat produksi dan permodalan Kelompok Usaha Perempuan Kartini Desa bidang usaha keripik dan sale pisang		jam pelajaran agama islam yang tadinya 3 (tiga) jam mata pelajaran sekarang di kurangi menjadi 1 (satu) jam pelajaran		
	Pengadaan pakaian dan alat musik traditional Kelompok Seni Calung Balebat	Di bangun saluran pembuangan air RT 15/ RW 04	Penanganan Covid-19 di Desa Jangraga (Pemberian Maskar, Alat Tes Suhu Tubuh)	Peningkatan jalan Desa Blok Bojong - Tegalame Dusun Nusagede	Peningkatan jalan gang RT 001 RW 010 Dusun Nusagede dengan tebal 10 Cm panjang 40 Meter
	Pembangunan sanggar seni musik traditional Calung Balebat	Di bangun saluran pembuangan air di RT 09, RT 10 RT 12	Melengkapi ALKES di Puskesmas Kecamatan Mangunjaya untuk	Peningkatan jalan Desa Blok Kadawung - Calaban Dusun Barengkok	

			Penanganan Covid-19		
	Perlu adanya perhatian yang lebih untuk para kelompok tani terkait pemberian bibit tanam dan program pengembangan pertanian	Pembuatan TPT jalan Desa Kondangjajar RT 19, RT 26, RT 27	Sosialisasi tentang bahaya covid-19 kepada masyarakat	Penataan Lapang Gunung Tumpeng	
	Pembangunan Rutilahu untuk masyarakat karena masih banyak warga yang rumahya tidak layak huni	Peningkatan jalan ciguha RT 033 RW 08	Pelaksanaan Ambulans gratis masih banyak terjadi keluhan dari masyarakat	Pembangunan bangunan bak sampah	
	Rabat Beton Jalan Makam Cibeulut Dusun Ciakar volume 500x3x0,10	Sekretariat untuk KWT (Kelompok Wanita Tani) Dewi Sri	Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit sering menjadi keluhan dari masyarakat yang berobat,	Pembangunan Rumah Data	
	Rabat bBeton Jalan Makam	Pengecoran Jalan gang mandala	Masih lemahnya sumber daya	Pembangunan Rabat beton gang Mesjid Al	

	Ciawi Dusun Ciakar volume 700x3x0,10	untuk jembatannya	manusia Kabupaten Pangandaran dan kurangnya personil di lingkup pemerintah Kabupaten Pangandaram	Bahar	
	Rabat Beton Jalan Legok Kendal Cisepan Dusun Ciakar volume 500x3x0,10	Pendataan penerima RUHTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni)	Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat	Pembangunan Drainase Sanghiangkalang	
	Rabat Beton Jalan Cijumleng Dusun Ciakar Dusun Ciakar volume 450x3x0,10	Insentif untuk RT /RW , Ajengan, Kader, Linmas yang tahun 2020 segera di cairkan	Pemasangan PJU	Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Sanghiangkalang	
	Rabat Beton Jalan Ampel Dusun Cisodong sepanjang 450	Peningkatan Jalan Dusun Margajaya RT 05/RW 15	Alat pertanian/traktor untuk setiap Dusun	Rabat Beton Jalan Pasirmanggah. Jalan Citaritih0Cigintung, Jalan Padudan-	

	M			Pasiroari, Jalan Sarojaya dan Jalan Makam Cipeding Luas 500 m	
	Pengerasan Jalan Ranca Simperem-Ciakar Dusun Cisodong volume 700x3x0,10	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di setiap Puskesmas-puskesmas Di Kab. Pangandaran			
		Pendataan ulang untuk penerima RUHTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni), BPNT dan PKH			

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan anggota perempuan DPRD Kabupaten Pangandaran

perwakilan dari Partai Gerindra

Ibu Dyah Retu Badraeni, S.Sn



Pangandaran, 21 November 2023

Wawancara dengan anggota perempuan DPRD Kabupaten Pangandaran
perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Ibu Sri Rahayu, S.Sos



Pangandaran, 27 November 2023

Wawancara dengan anggota perempuan DPRD Kabupaten Pangandaran
perwakilan dari Partai Golongan Karya
Ibu Ade Ruminah, S.H



Pangandaran, 19 Desember 2023

Wawancara dengan anggota perempuan DPRD Kabupaten Pangandaran
perwakilan dari Partai Amanat Nasional
Ibu Yenyen Windiani, S.H



Pangandaran, 4 Januari 2024

Wawancara dengan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak subkoordinator seksi pemberdayaan perempuan

Drs. Nanang, M.Si



Pangandaran, 24 November 2023

JADWAL PENELITIAN

No.	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Okt	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Penelitian Lapangan																
4.	Pengolahan & Analisis Data																
5.	Penyusunan Hasil Penelitian																
6.	Laporan Hasil																